

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia sudah menjadi bangsa yang merdeka. Peristiwa tersebut telah membawa perubahan bagi rakyat Indonesia menjadi satu bangsa yang terlepas dari tekanan bangsa asing. Maka, bangsa Indonesia harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya, karena Belanda berambisi untuk menjajah dan menguasai Indonesia kembali. Perjuangan itu berlangsung dari tahun 1945-1949.

Usaha-usaha untuk menanggulangi ancaman kembalinya penjajah Belanda ke Indonesia dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama adalah diplomasi, yaitu sebagai alat yang digunakan untuk menjamin penyerahan (pengakuan) kedaulatan. Cara yang kedua adalah perjuangan yang timbul dari keyakinan bahwa kemerdekaan sejati hanya akan dapat dicapai melalui konfrontasi yang tidak mengenal kompromi dengan Belanda (Leifer, 1989 : 12).

Belanda hendak mempertahankan kedudukannya di Indonesia. Berbagai jalan ditempuh oleh Letnan Gubernur Jenderal H J. Van Mook yang menerapkan politik *divide et impera* dengan membentuk negara boneka. (M. Hutauruk, 1984 : 36) Dengan cara melakukan perjanjian dengan penguasa lokal, seperti Perjanjian Malino (25 Juli 1946), Linggarjati (10 Nopember 1946), Renville (8 Desember 1947), Roem Royen (7 Mei 1949), dan membentuk badan-badan pemerintahan lokal (Serikat).

Belanda terus berusaha menanamkan pengaruh dari kekuasaannya untuk membentuk negara Serikat/Federasi dengan membentuk negara-negara bagian dalam BFO (Bijeenkomst Voor Federaal Overleg) pada tahun 1948. Jalan perundinganpun ditempuh, tetapi mengalami kegagalan baik dalam perjanjian Linggarjati, maupun Renville dan akhirnya Belanda melakukan agresi militernya yang kedua terhadap bangsa Indonesia. Akibat agresi tersebut, rakyat semesta Indonesia melakukan perlawanan sipil dan bersenjata, lahir peristiwa perang Ambarawa, Bojongkokosan, Blitar, Bandung Lautan Api, dan lain-lain. (Masykuri, 1986 : 37)

Maka pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk menghentikan permusuhan dengan mengembalikan pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta dan segera memulai perundingan. Perundingan antara RI yang dipimpin oleh Muhammad Roem dengan Belanda yang dipimpin Dr Van Royen, dimulai pada tanggal 12 April. Maka perjanjian antara Belanda dengan RI ditanda tangani pada tanggal 7 Mei 1949, yang dikenal dengan nama Roem Royen Statement (Lukman Harun dalam pak Natsir 80 tahun, 1988 . 5)

Isi pokok dari perjanjian Roem Royen yaitu mengadakan gencatan senjata, pengembalian pemimpin-pemimpin pemerintah RI ke Yogyakarta, dan menyelenggarakan Konferensi Meja Bundar antara Indonesia, BFO, dan Belanda.

Perundingan Roem Royen berlangsung pada tanggal 14 April 1949. Dalam perundingan itu, Roem mengecam serangan-serangan yang dilancarkan Belanda terhadap Republik. Dalam pidatonya Roem menyatakan, agresi militer Belanda

kedua telah mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan rakyat Indonesia bagi berhasilnya suatu perundingan damai (Merdeka Pos, 18 april 1949)

Dalam KMB dibahas persoalan-persoalan antara Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan pertikaian politik sejak persetujuan Linggarjati dan Renville yang belum mendapat penyelesaian secara baik, karena masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh kolonial Belanda (Masykuri, 1986 : 166)

Sebelum pelaksanaan KMB, wilayah nusantara terbagi menjadi 17 negara bagian Bangsa Indonesia terpaksa memilih bentuk negara federal, karena pembentukan negara tersebut merupakan proses pengakuan kedaulatan dan penyatuan wilayah-wilayah bekas jajahan Belanda yang berada dibawah tekanan politik *divide et impera*. Melalui Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Republik Indonesia Serikat mendapat pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Piagam pengakuan kedaulatan RIS ditanda tangani oleh Ratu Juliana di Amsterdam pada tanggal 27 Desember 1949. Maka pada hari yang sama, sebuah tim bekerja di Scheveningen menyusun konstitusi RIS. (Republika, Selasa, 17 Juli 2001 : 10)

Pembentukan negara federal tersebut tidak mewakili semangat sebagian besar rakyat Indonesia. Setelah RIS berdiri beberapa bulan, pada awal tahun 50-an banyak daerah dari negara bagian yang ingin menggabungkan diri dengan Republik Indonesia yang merupakan salah satu negara bagian RIS dan melepaskan diri dari negara bagiannya.

Maka timbullah pergolakan dalam Dewan Perwakilan RIS, untuk mengadakan penyelesaian yang integral dan programatis terhadap perkembangan politik yang terjadi pada waktu itu. (Yusuf Abdullah Fuar, 1978 96)

Meskipun tidak duduk dalam kabinet, perhatian Natsir kepada negara dan bangsa tidak surut. Setelah KMB disetujui, Indonesia terbagi menjadi 15 negara bagian dan salah satu diantaranya negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta. Muhammad Natsir protes atas persetujuan tersebut. Semula ia diminta Hatta menjadi Perdana Menteri di Yogyakarta, tetapi ia menolak dan memilih berjuang di Masyumi yang dipimpinnya. Melalui partai Masyumi Natsir menjadi anggota parlemen Republik Indonesia Serikat. (Republika, Selasa, 17 Juli 2001 9)

Sebagai seorang tokoh politik yang menginginkan utuhnya negara kesatuan RI, Muhammad Natsir menangkap aspirasi yang disampaikan rakyat dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Maka dalam sidang Dewan Perwakilan RIS tanggal 3 April 1950, beliau menyampaikan gagasannya untuk menyelesaikan masalah tersebut dalam pidatonya yang disebut dengan "Mosi Integral Muhammad Natsir".

Muhammad Natsir adalah seorang tokoh besar. Dia bukan hanya tokoh politik Islam, tetapi juga tokoh sejarah Indonesia. Pada tahun 1949-1958 Natsir menjadi ketua umum dan antara tahun 1946-1949 menjadi menteri penerangan. Dari bulan September 1950 sampai bulan April 1951, Natsir menjabat sebagai Perdana Menteri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada tahun 1958, ia bergabung dengan para pemberontak di Sumatera Barat dalam PRRI. Natsir

mengajukan Islam sebagai dasar negara dan memperjuangkannya dengan gigih di Majelis konstituante di masa Demokrasi Liberal (Parlementer) (Al-Chaidar, 1999 : 143)

Dengan latar belakang masalah di atas Penulis mencoba untuk menulis skripsi dengan judul MOSI INTEGRAL MUHAMMAD NATSIR DALAM MENYELAMATKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1950.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah biografi Muhammad Natsir?
2. Faktor-faktor apa yang membuat Muhammad Natsir melakukan Mosi Integral dalam sidang parlemen dan bagaimana proses pelaksanaannya?

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, penulisan skripsi ini diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui biografi M.Natsir
2. Untuk mengetahui peranan M Natsir, faktor-faktor melakukan Mosi Integral dan proses pelaksanaannya?

C. Langkah-langkah penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode sejarah. Melalui metode sejarah diharapkan tulisan ini mampu menampilkan rekonstruksi sejarah dengan tingkat objektivitas yang memadai. Selain itu, penggunaan metode sejarah ditujukan agar penulisan ini dapat berjalan secara sistematis. Metode sejarah ini terdiri dari empat tahapan yaitu :

1. Tahapan Heuristik

Yaitu tahapan pengumpulan data sebagai sumber sejarah. Melalui tahapan ini, penulis berusaha mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan judul melalui studi kepustakaan. Untuk selanjutnya dilakukan pengklasifikasian data, hingga didapat data primer. Yaitu data yang diperoleh berupa dokumen resmi yang terjamin otensitasnya. Sedangkan data sekunder bisa diperoleh dari buku-buku atau majalah. Penulis melakukan studi kepustakaan untuk mengumpulkan sumber tertulis. Sumber tertulis yang relevan dengan tema yang dikaji seperti :

MEMOAR Senarai Kiprah Sejarah yang diangkat dari majalah TEMPO No 261/93, wawancara TEMPO (Agus Basri) tanggal 2-12-1989 dengan Mohammad Natsir, yang mengulas sisi kehidupan Natsir sejak asal kelahirannya di Minangkabau dan sekilas tentang keterlibatannya dalam politik praktis.

MUHAMMAD NATSIR 70 Tahun Kenang-kenangan Kehidupan dan Perjuangan, karya Yusuf Abdullah Fuar, mengulas sisi kehidupan Natsir sejak asal kelahirannya, sampai keterlibatannya dalam politik praktis tahun 1958

MUHAMMAD NATSIR Sebuah Biografi, jilid I karya Ajip Rosidi, mengulas kehidupan M Natsir sampai menjelang kedatangan Jepang yaitu ketika terjadi polemik antara agama dan negara dengan Soekarno

Pak Natsir 80 tahun, Pandangan dan Penilaian Generasi Muda, disunting oleh H. Endang Saefudin Anshori dan M. Amin Rais, mengulas pandangan para generasi muda tentang perjuangan dan pemikiran M Natsir tentang demokrasi.

MUHAMMAD NATSIR, Dakwah dan Pemikirannya, karya DR. Thohir Luth, mengulas biografi M. Natsir dan pemikirannya tentang konsep Dakwah Islam

SOEKARNO VS NATSIR, karya Ahmad Suhelmi yang mengulas tentang latar belakang kehidupan M Natsir dan Soekarno, sampai perdebatannya mengenai pemisahan agama dan negara.

2. Tahapan Kritik

Dalam tahapan ini, sumber-sumber informasi dari jejak masa lampau yang telah ditemukan kemudian diteliti dan diuji melalui kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern digunakan untuk mengetahui otentisitas informasi yang diperoleh Sedangkan kritik ekstern dimaksudkan untuk mengukur masalah kredibilitas suatu sumber yang diperoleh, dalam hal ini tidak dilakukan kritik ekstern.

3. Tahapan Interpretasi

Interpretasi merupakan tahap menafsirkan dan menganalisa data yang sudah diyakini kredibilitasnya. Penulis berupaya melakukan pengkajian secara kritis dengan meminimalisir keterlibatan emosional yang berlebihan.

Salah satu jasa terbesar Muhammad Natsir bagi bangsa Indonesia adalah menyatukan kembali Republik Indonesia pada tahun 1950. Dalam dirinya terkandung sifat intelektual muslim, pemikir, demokrat dan rasa toleransi tinggi (Yusri Ihza Mahendra dalam *Republika*, Selasa, 17 Juli 2001 : 12)

Muhammad Natsir merupakan salah satu diantara tokoh Indonesia yang multi dimensional. Ia seorang pembaru, intelektual muslim, seorang politisi, dan demokrat sejati yang selalu memperjuangkan keyakinan politiknya secara konstitusional dan demokratis. Selain seorang aktivis organisasi, ia juga seorang da'i dan tokoh internasional yang turut mengangkat harkat negara dan bangsa dimata dunia. (Tarmizi Taher dalam *Muhammad Natsir sumbangan dan pemikirannya untuk Indonesia*, 1995 : 110-111)

Pada masa-masa awal kemerdekaan Republik Indonesia, Muhammad Natsir tampil menjadi salah seorang politisi dan pemimpin negara. Tampilnya M Natsir ke puncak pemerintahan tidak terlepas dari langkah strategisnya dalam mengemukakan mosi pada sidang parlemen RIS tanggal 3 April 1950. (Thohir Luth, 1999 : 24-25)

Salah satu pedoman penting yang senantiasa dipegang Natsir ialah mengusahakan kepentingan umum rakyat secara keseluruhan dengan tidak memandang tingkatan dan golongan. Semboyan yang dipakainya bukanlah "kami berjuang untuk kami" tetapi, "kami berjuang untuk kita", untuk seluruh rakyat Indonesia. (Yusuf Abd Fuar, 1978 : 341)

Salah satu teori dalam kajian sejarah adalah "Grand Theory (Teori orang besar) teori ini dikemukakan oleh Sejarawan Inggris Thomas Carlyle (1795-1881)

menyatakan bahwa sejarah digerakkan oleh orang-orang besar (Kuntowijoyo, 1994 . 184)

Dengan demikian, tidak akan ada sejarah tanpa keterlibatan orang besar. Teori ini bila diterapkan untuk mengamati Mosi integral M Natsir dalam menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950, maka hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari peranan dan figur M Natsir yang bertekad untuk menyelamatkan negeri ini dari perpecahan.

4. Tahapan Historiografi

Yaitu tahapan penyampaian hasil-hasil rekonstruksi imajinatif yang sesuai dengan data-data yang ada. Objektivitas dan subjektivitas penulis telah masuk kedalamnya. Tahap ini merupakan akhir dari kegiatan penelitian terhadap sumber-sumber yang berhubungan dengan Mosi Integral Muhammad Natsir dalam menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950.

Penulisan ini dibagi menjadi empat bab, diantaranya: bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, langkah-langkah penelitian.

Bab kedua, menjelaskan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Minagkabau pada tahun 1908, kelahiran dan pendidikan Mohammad Natsir, menguraikan aktivitas Natsir dalam berbagai organisasi

Bab ketiga, membahas revolusi terbuka antara Indonesia dan Belanda Yang dimulai setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, sampai perjanjian Konferensi Meja Bundar tahun 1949, pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat tahun 1949, peran Mohammad

Natsir dan Mosi Integral dalam menyatukan negara-negara federal ke dalam negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950, serta pandangan Negarawan-negarawan masa Orde Lama dan masa sekarang terhadap Natsir.

Bab keempat adalah kesimpulan. Selain keempat bab tersebut. Penulisan skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG